

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan akuntansi disektor publik di Indonesia makin cepat asertaya era mereformasi didalam melaksanakan otonomi daerah serta desentralisasi *fiscal* memprioritaskan pada pemerintah daerah. *Trend* globalisasi dituntut daya saing disetiap negara dituntut daya saing disetiap pemdanya. Daya saing pemda ini diinginkan akan dicapai melangkai peningkatan independensi bisa diraih melangkai asertaya otonomi daerah. Akuntansi sektor publik ialah activity akuntansi dilangsungkan terhadap kejadian serta transaksi finansial organisasi sektor publik. Diterapkannya prosedur akuntansi pada *organisasi* pemerintahan bukanlah diartikan akuntansi *organisasi* komersial seutuhnya hingga pada *organisasi* pemerintahan. Dikarenakan *organisasi* sektor publik paling utama ialah pemerintahan, hingga akuntansi sektor publik bisa dinyatakan sebagai activity akuntansi memakai pada pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun pemda. Saat mejalankan otonomi daerah, pemda dituntut mejalankannya roda pemerintahan secara *effective* serta *efficient* dalam pembangunan serta peningkatan kesetaraan serta keadilan dengan pengembangan seluruh kapasitas dipunyai oleh disetiap daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kekuatan didalam bidang finansial ialah salah satu indicator penting dalam

Daerah otonomi diinginkan mampu serta independen dalam dibiayai kegiatan pmdanya dengan tingkat keterlibatan finansial kepada pemerintah pusat punya proporsi lebih kecil (Siregar, 2017)

Daerah otonom ialah kesatuan penduduk hukum mempunyai batasan wilayah berwenang dalam mengurus serta menyusun urusan pemerintah serta bagi keperluan penduduk setempat menurut gagasan sendiri didasarkan aspirasi dari penduduk didalam sistem NKRI. Pemda diberikan hak serta wewenang dalam menjalankan kegiatannya secara independen didasarkan asas dekosentrasi, asas pembantu, serta asas desentralisasi. Asertaya otonomi daerah diinginkan DPRD bisa melakukan kegiatan-kegiatan pemerintah dengan leluasa serta optimal terutama berrangkaian dengan pembangunan *soft* serta *hard* prasarana. Guna diketahui kinerja dari DPRD hingga diperlukan pengukuran kinerja bisa dilihat dari laporan finansialnya. Laporan finansial tersebut bisa dilihat apakah diserapkannya *budget* berjalan secara *effective* serta *efficient* ataupun tidak. *Efficiency* serta *effectiveness* sangat diperlukan dalam mewujudkan *budget*. Dengan tingkat *efficiency* serta *effectiveness* baik, itu diartikan program-program pemerintah dijalankan sesuai *budget* awal. *Efficiency* serta *effectiveness* ialah isu umum bagi instansi pemerintah. Banyak instansi pemerintah berusaha untuk dicapai *criteria effective* serta *efficient* dalam penyerapan *budget*. Namun untuk dicapai *criteria* tersebut bukanlah hal gampang. Instansi pemerintah harus mewujudkan *budget* sudah ditetapkan. Apabila *budget* tidak diserap dengan baik, hingga *criteria effective* serta *efficient* tidak akan dicapai. Tentunya pemda tidak bekerja sendirian, mereka dibantu oleh organisasi perangkat daerah/Dinas. Dinas ini mempunyai tugas untuk mewujudkan ataupun mengimplementasikan rencana kegiatan

pemerintah ditahun *budget* ataupun Periode tertentu. Untuk penilaian *effective* ataupun tidaknya realisasi *budget* di Dinas hingga perlu dibandingkan diantara dokumen pelaksana *budget* dengan laporan realisasi anggaran Dinas terkait (Prasetyo, 2020)

Kinerja finansial bisa dipengaruhi oleh komponen-komponen didalam laporan saat direalisasikannya APBD terdiri dari pendapatan serta belanja daerah. Dari beberapa komponen terdapat kedalam laporan realisasi APBD meyakini kinerja finansial bisa mempengaruhi rencana *budget*, makin banyak rencana *budget* makin tinggi juga produktivitas perekonomian didalam kinerja finansial pemda. Pemerintah bisa peningkatan prasarana sudah dibangun untuk pelayanan *public* bersumber dari dana sudah dialokasikan dalam bentuk rencana anggaran belanja tersebut. Perencanaan anggaran serta realisasi *budget* pendapatan serta belanja daerah sangat penting dilangsungkan dikarenakan dengan begitu kita bisa diketahui tingkat kinerja finansial pemda setiap tahunnya sehingga di tahun berikutnya pemerintah bisa peningkatan effectiveness kinerjanya (Honga, 2014).

Sekretariat DPRD ialah salah satu entitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekaligus sebagai penggunaan *budget* dibuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang sudah dilakukannya. Laporan Realisasi *Budget* ialah laporan penyediaan berbagai informasi mengenai realisasi budget, pembiayaan, belanja, dan sebagainya serta dibandingkan sejumlah *budget* didalam suatu *Periode*. Kegiatan belanja umumnya diturunkannya saldo *budget* lebih pada dari suatu *Periode budget* bersangkutan. Transaksi didalam activity pembelanjaan nantinya tidak akan ditemukannya pembayaran kembali dari pemerintah (Rusdi, 2018).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dipublikasikan penda diberi informasi sangat bermanfaat untuk penilaian kinerja finansial daerah. Kalau diperbandingkan dengan *balance sheet* LRA menduduki prioritas utama serta LRA ini ialah dengan jenis laporan finansial daerah kemudian dihasilkan sebelum dibuatkan laporan *balance sheet* serta laporan cash flow. *Budget* dalam pemerintah ialah tulang punggung penyelenggaraan pemerintah. *Budget* mempunyai berperan utama sebagai *distribution*, alokasi sumber daya publik, perencanaan, stabilisasi serta pengendalian *organisasi* serta dinilai kinerja tersebut. Objek riset ini ialah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dipilih sebagai objek riset dikarenakan sebagai lembaga pemerintah ataupun instansi mengelola finansial daerah baik itu pendapatan ataupunpun belanja (Renyowijoyo, 2012)

Didasarkan hasil pengamatan, Observasi, serta wawancara saya lakukan kepada ibu Ni Made Sukreni, S.Sos., M.Si selaku Kabag Akuntansi serta Bendahara pada Sekretariat DPRD Kab. Buleleng narasumber menyampaikan permasalahan sering terjadi ialah sebagai berikut,

Didasarkan pengalaman ibu kerja di instansi ini sering terjadi di Sekretariat DPRD Kab. Buleleng ialah lemahnya koordinasi antara perencanaan serta pelaksanaan *budget*, ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan, pelaksanaan serta pencairan *budget* antara APBN serta APBD, satuan harga ditetapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil serta banyaknya revisi dokumen anggaran sehingga menyebabkan realisasi budget belanja kurang maksimal” .

Didasarkan deskripsi diatas, panelis tertarik untuk mejalankan riset yang berjudul “ Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng” .

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan deskripsi latar belakang diatas hingga masalah diangkat kedalam riset ini yakni bagaimana *efficiency* serta *effectiveness* realisasi anggaran belanja ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng didasarkan laporan LRA tahun 2019 serta 2020 ?

1.3 Bertujuan Riset

Adapun maksud serta bertujuan dari riset ini ialah untuk diketahui tingkat *efficiency* serta *effectiveness* realisasi anggaran belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.

1.4 Bermanfaat Riset

Adapun bermanfaat dibisa dari panelisan ini ialah sebagai berikut :

1. Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Hasi riset ini diberi gambaran serta informasi mengenai tingkat efesiensi serta *effectiveness* penggunaan budget belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng didasarkan laporan LRA tahun 2018 serta 2019

2. Bagi Universitas



Hasil riset ini diberi gambaran serta informasi mengenai penggunaan *budget* pada organisasi sektor publik

3. Bagi Panelis

Bisa menambah wawasan, pengalaman, serta pengetahuan panelis tentang Analisis Realisasi Anggaran

4. Bagi Pihak Lain

Bisa dipakai untuk tambahan referensi dalam menjalankan Analisis Realisasi Anggaran pada Organisasi Sektor Publik

